

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis evaluasi kebijakan ganjil-genap di DKI Jakarta dari perspektif multi-stakeholder menggunakan kriteria evaluasi William N. Dunn (efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan), dapat disimpulkan bahwa kebijakan ganjil-genap masih memiliki peran dalam pengendalian lalu lintas, khususnya dalam mengurangi volume kendaraan pribadi dan membantu kelancaran arus lalu lintas pada jam-jam tertentu. Namun, dari aspek efektivitas yang lebih luas, kebijakan ini belum sepenuhnya mampu menyelesaikan permasalahan kemacetan secara menyeluruh karena masih terjadi pergeseran perilaku masyarakat seperti pengalihan rute, perubahan jam perjalanan, hingga kepemilikan kendaraan tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa dampak kebijakan masih bersifat parsial.

Dari perspektif multi-stakeholder, terdapat perbedaan pandangan antar aktor. Pemerintah cenderung menilai kebijakan ini sebagai instrumen pengendalian lalu lintas yang masih relevan, sedangkan sebagian masyarakat menilai kebijakan ini membatasi mobilitas dan menimbulkan ketidaknyamanan. Sementara itu, kelompok organisasi lingkungan seperti Greenpeace melihat perlunya pendekatan yang lebih komprehensif yang tidak hanya berfokus pada pembatasan kendaraan, tetapi juga pada transformasi sistem transportasi secara menyeluruh.

Dari perspektif Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, kebijakan ganjil-genap dinilai masih relevan untuk dipertahankan karena mampu membantu mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi pada ruas jalan tertentu serta menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mengurangi kepadatan lalu lintas perkotaan. Selain itu, kebijakan ini juga dianggap dapat mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum sehingga mendukung terciptanya sistem transportasi yang lebih berkelanjutan.

Dari perspektif Greenpeace Indonesia, kebijakan ganjil-genap masih dapat dipertahankan sebagai langkah pengendalian lalu lintas, namun tidak dapat dijadikan solusi utama dalam mengatasi permasalahan pencemaran udara di Jakarta. Greenpeace menilai bahwa pencemaran udara di Jakarta dipengaruhi oleh

berbagai sumber emisi lainnya seperti sektor industri, pembangkit listrik berbahan bakar fosil, dan kendaraan bermotor secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan ganjil-genap perlu didukung oleh kebijakan lingkungan yang lebih komprehensif, termasuk penguatan pengawasan emisi, percepatan transisi energi bersih, serta pengembangan transportasi publik yang lebih baik.

Sementara itu, dari perspektif masyarakat yang terdampak, baik pengguna transportasi umum maupun pengguna kendaraan pribadi, kebijakan ganjil-genap pada umumnya masih dapat diterima karena dinilai mampu mengurangi kepadatan lalu lintas pada waktu dan lokasi tertentu. Pengguna transportasi umum cenderung melihat kebijakan ini sebagai upaya pemerintah untuk mendorong penggunaan moda transportasi massal. Di sisi lain, pengguna kendaraan pribadi mengakui adanya manfaat dalam pengurangan kemacetan, meskipun sebagian masih merasakan keterbatasan akibat pembatasan mobilitas yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut.

Berdasarkan temuan tersebut, kebijakan ganjil-genap dapat disimpulkan masih layak dipertahankan, namun tidak cukup jika berdiri sendiri sebagai satu-satunya instrumen pengendalian lalu lintas. Kebijakan ini perlu diintegrasikan dengan penguatan transportasi publik, peningkatan kepatuhan masyarakat, serta kebijakan pendukung lain yang lebih berkelanjutan agar tujuan pengendalian mobilitas perkotaan dapat tercapai secara optimal.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menjadikan kebijakan ganjil genap sebagai bagian dari mengandalkan pembatasan kendaraan pribadi, tetapi juga harus didukung oleh kebijakan lain seperti perluasan kawasan rendah emisi, penerapan Electronic Road Pricing (ERP), penguatan program uji emisi kendaraan bermotor, serta pengembangan penggunaan kendaraan listrik yang lebih masif. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat koordinasi antarlembaga dalam merumuskan kebijakan yang mampu mengatasi berbagai sumber pencemaran udara secara bersamaan.

Bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta perlu terus melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan ganjil-genap untuk memastikan kebijakan tersebut tetap relevan dengan kondisi lalu lintas yang terus berkembang. Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih intensif dengan instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan dan Kepolisian, guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan aturan di lapangan. Pemerintah juga perlu mendukung kebijakan ganjil-genap melalui peningkatan kualitas, aksesibilitas, dan integrasi transportasi umum sehingga masyarakat memiliki alternatif mobilitas yang lebih nyaman dan efisien.

Bagi Masyarakat Masyarakat diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kebijakan ganjil-genap dengan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat juga perlu mulai mempertimbangkan penggunaan transportasi umum sebagai alternatif mobilitas sehari-hari guna mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Dukungan dan partisipasi masyarakat sangat penting karena keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah sebagai pelaksana, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat sebagai pihak yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki berbagai keterbatasan, terutama dalam cakupan informan dan metode penelitian yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian berikutnya dapat mengembangkan kajian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang lebih mendalam melalui analisis data kualitas udara, data emisi kendaraan, maupun data lalu lintas sebelum dan sesudah penerapan kebijakan. Selain itu, penelitian komparatif mengenai kebijakan pengendalian transportasi di kota-kota lain, baik di Indonesia maupun luar negeri, juga dapat dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai efektivitas berbagai alternatif kebijakan dalam mengatasi permasalahan pencemaran udara perkotaan. Dengan demikian, hasil penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif bagi pengembangan kebijakan transportasi dan lingkungan hidup di masa mendatang.